

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arizona, Yance, dkk. *Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, (Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, 2023).
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*; (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press; 2004).
- Ghaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Herniwati, *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2019).
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Palguna, I Gede Dewa. *Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Perdana, Aditya dan Ferry Kurnia Rizkyansyah. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).
- Ramadhani, Rizki. *Politik Hukum Pemilu*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2016).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).

Skripsi

Fadzlina, Nurul Auliya. Skripsi: “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah”, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), 52.

Moch. Rasyid Gumilar. Skripsi: “Dari *Purcell* ke *Winter*: Menemukan Kriteria yang Tepat Bagi MK dalam *Judicial Review* UU Pemilu di Tengah Tahapan Pemilu Untuk Pencegahan *Abusive Judicial Review*”, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2025), 27.

Subri, Joko. Skripsi: “Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2019), 88.

Jurnal

Azhumathkan, Syarif H, dan Adhitya T. F, “*Reflections on Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing*”, *Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Nasional* Vol. 3, no.1 (June, 2024): 14.

Dodsworth, Harry B, “*The Positive and Negative Purcell Principle*”, *Utah Law Review* 2022, no. 5 (2022): 1097,

Fajri, Ari, dkk. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian UU Pemilu Tahun 2024”, *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 2

Gao, Ruoyun, “*Why The Purcell Principle Should be Abolished*”, *Duke Law Journal* 71, issue 5 (2022): 1143.

Gumilar, Moch. Rasyid, “Menakar Pengaruh Perubahan Sistem Pemilihan Legislatif 2024 dari Melalui Mekanisme *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (Agustus, 2024): 5

- Hasen, Richard L, “*Reining in the Purcell Principle*”, *Florida State University Law Review* Vol. 42, issue 2 (2017): 434.
- Hasibuan, Syaiful Asmi “Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan Negara dengan Demokrasi”, *Jurnal Dharmawangsa* 17, no. 2 (April, 2023): 603
- Houston, Rachel, “*Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines ‘Time’ Using the Purcell Principle,*” *Nevada Law Journal* 22, (2023): 774
- Muhammad, Raihan. “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 10, no. 1 (June, 2025): 72.
- Nugraha, Kristiawan Putra, dkk, “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 5, no. 2 (September, 2024): 97-98.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, dkk. “*Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 2 (September 1, 2025): 362,
- Putra, Zulfikar dan Ridwan Umpi. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal KNAPHTN* 2, no. 1 (December, 2024): 469
- Rohman, Azmi Fathu, dkk, “Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip *Purcell* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4, no. 2 (January, 2025): 458.
- Sari, Adena Fitri P, dan Purwono Sungkono R, “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (December, 2022): 689.
- Schmidt, Casey P, “*Disrupting Election Day: Reconsidering The Purcell Principle as a Federalism Doctrine*” *Virginia Law Review* Vol. 110, issue 6 (October, 2024): 1541.
- Wicaksono, Dian Agung dan Garuda Era Ruhpinesthi. “Inisiasi Penerapan *Purcell Principle* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 14, 2025): 115.
- Wijaya, Rangga, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 30, 2023): 25.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Perekaman E-KTP Untuk Memilih

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen

Putusan MA Nomor 24/P-HUM/2023 tentang Syarat Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif

Putusan MA Nomor 23/P-HUM/2024 tentang Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Internet

Andayani, Dwi. “KPU: 7 Juta Pemilih Berpotensi Tak Dapat Gunakan Hak Pilih”, <https://news.detik.com/berita/d-4212355/kpu-7-juta-pemilih-berpotensi-tak-dapat-gunakan-hak-pilih>, diakses pada 28 Desember 2025.

Ballotpedia, “*Election Lawsuits and Litigation 2024*”, https://ballotpedia.org/Election_lawsuits_and_litigation,_2024, diakses pada 3 Januari 2026.

DA, Ady Thea. “Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Calon Kepala Darah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-1t66c5d09a26ad4/?page=2>, diakses pada 28 Desember 2025.

Fadilah, Kurniawan, “KPU: Calon Tunggal di Pilkada 2024 Ada 37 Wilayah”, <https://news.detik.com/pilkada/d-7554207/kpu-calon-tunggal-di-pilkada-2024-ada-37-wilayah>, diakses pada 11 Januari 2026.

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, “Perbandingan Sistem Hukum: *Civil Law vs Common Law*”, <https://hukum.uma.ac.id/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-vs-common-law/>, diakses pada 3 Januari 2026.

Gracia. “Apa Itu *Judicial Review* dan Bagaimana Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung?”, <https://heylaw.id/blog/kewenangan-judicial-review-mahkamah-agung>, diakses pada 16 Desember 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah”, <https://www.mkri.id/berita/mk:-persyaratan-harus-dipenuhi-sebelum-penetapan-calon-kepala-daerah-21467>, diakses pada 28 Desember 2025.

Muhid, Hendrik Koirul. “Kronologi Ribuan Massa Kepung Gedung DPR Unjuk Rasa Kawal Putusan MK”, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-ribuan-massa-kepung-gedung-dpr-unjuk-rasa-kawal-putusan-mk--16598>, diakses pada 20 November 2025.

Muliawati, Anggi. “Ketua MK: UU Pemilu Pilkada Paling Banyak Diuji Selama 2024”, <https://news.detik.com/berita/d-7713940/ketua-mk-uu-pemilu-pilkada-paling-banyak-diuji-selama-2024>, diakses pada 20 Oktober 2025.

Rendanianti, Annisa. “5 Undang-Undang yang Paling Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi”, <https://data.goodstats.id/statistic/5-undang-undang-yang-paling-sering-diuji-di-mahkamah-konstitusi-0GgP7>, diakses pada 3 Januari 2025.

Rohman. “Dirjen Dukcapil Klaim Tak Pernah Beri 31 Juta Data Pemilih Tambahan Ke KPU”, <https://harianumum.com/baca/dirjen-dukcapil-klaim-tak-pernah-beri-31-juta-data-pemilih-tambahan-ke-kpu>, diakses pada 28 Desember 2025.

Scotusblog. “*Purcell Principle: a Presumption Against Last Minute Changes To Election Procedures*”, <https://www.scotusblog.com/election-law-explainers/the-purcell-principle-a-presumption-against-last-minute-changes-to-election-procedures/>, diakses pada 1 Desember 2025.

Volle, Adam. “*Purcell Principle*”, <https://www.britannica.com/topic/Purcell-principle>, diakses pada 3 Januari 2026.

Wawancara

Moch. Mansur Syariffudin (2026). Wawancara Pribadi, 2 Januari 2026, Tegal.

LAMPIRAN: SURAT BALASAN PERMOHONAN WAWANCARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Nomor : 79/PLB.01.6-SD/3376/2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Riset/
Penelitian**

Tegal, 31 Desember 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 988/UN7.FI/AK/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal permohonan izin riset/penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **KPU Kota Tegal menyetujui dan menerima** mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian di lingkungan instansi kami:

Nama : Chalanta Diva Maharani
NIM : 11000122120067
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Prospek Pembatasan Kewenangan Lembaga Kekuasaan
Kehakiman Indonesia Dalam Pengujian Regulasi Tentang
Pemilihan Umum Berdasarkan Purcell Principle

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih


Ketua,
Karyudi Prayitno

Tembusan kepada Yth:
1. Sekretaris KPU Kota Tegal;
2. Arsip.